

Hegemoni Ideologi Penguasa terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Zulkarnain^{a, 1*}

^a Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ Zulkarnainmuhsinin@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Diterima:

07-12-2017

Disetujui:

02-04-2020

Kata kunci:

Pendidikan
Kewarganegaraan
Guru
PAP
Hegemoni
Singapura

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis Pendidikan Kewarganegaraan di Singapura secara kritis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu agenda nasional di Singapura memiliki kedudukan penting dalam memberikan pemahaman kewarganegaraan dalam rangka mempersiapkan warga negara muda untuk masa depan Singapura. Sistem pendidikan Singapura yang terpusat dan kontrol ketat mengakibatkan pendidikan kewarganegaraan sangat rentan terjadi politisasi dan ideologisasi warga negara melalui pendidikan. Bahkan banyak penelitian membuktikan bahwa pemerintah dibawah pemerintahan *People's Action Party* (PAP) menggunakan cara otoriter dalam mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya melalui pendidikan. Upaya pelanggengkan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dengan pemerintahan (*soft authoritarian*) otoriter lunak atau sebagian ahli mengatakan otoriter dengan artian Gramscian yang biasa di sebut "hegemoni". Hegemoni merupakan upaya seseorang atau sekelompok orang (negara) dalam mempertahankan atau dominasi kekuasaannya dengan cara damai bukan dengan cara kekerasan. Dengan penelitian kepustakaan dan metode deskriptif analitis kritis berupa buku dan penelitian relevan, makalah ini ingin menunjukkan bagaimana PAP berusaha menafsirkan ideologinya dengan hegemoni yang dilakukan kepada guru-guru Pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak semua guru terhegemoni oleh kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang ketat di Singapura.

ABSTRACT

The ideological hegemony of the authorities towards the citizenship education teacher. This paper wishes to conduct a critical analysis of Citizenship Education in Singapore. Citizenship education as one of the national agenda in Singapore has an important position in providing citizenship understanding in order to prepare young citizens for the future of Singapore. Singapore's centralized education system and strict controls lead to highly vulnerable citizenship education politicization and ideologization of citizens through education. In fact, many studies show that the government under the People's Action party (PAP) is using authoritarian ways to defend and perpetuate its power through education. The attempts by the Singapore government with the soft authoritarian government or some experts say authoritarian with the usual Gramscian meaning "hegemony". Hegemony is the effort of a person or group of people (state) in maintaining or dominating his power in a peaceful way not by violence. With literature research and critical analytical descriptive methods in the form of relevant books and research, this paper wants to show how the PAP seeks to interpret its ideology with the hegemony done to teachers of citizenship education. The study concludes that not all teachers are hegemonized by Singapore's strict citizenship education policy..

Copyright © 2020 (Zulkarnain). All Rights Reserved

How to Cite: Zulkarnain. (2020). Hegemoni Ideologi Penguasa terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(2), 1-11. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.4975



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini pendidikan menjadi sangat penting. Karena bekal pendidikan mampu meningkatkan sumber daya manusia suatu negara. Sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan merupakan modal yang berharga untuk tetap berdiri tegak ditengah-tengah persaingan global (Supardi, 2013, hlm. 1-2). Dalam membangun suatu negara pendidikan menjadi sebuah keharusan yang mutlak di lakukan negara dalam menunjang cita-cita dan tujuan setiap negara. Setiap negara di dunia memiliki cara tersendiri untuk membangun dan mempersiapkan generasi penerus bangsanya salah satu yang banyak negara gunakan adalah dengan mengembangkan warga negara muda dengan pendidikan.

Dalam sebuah sistem pendidikan ada tiga hal yang sangat mendasar dalam mengembangkan suatu pendidikan nasional suatu negara antara lain: (1) peserta didik, (2) guru, (3), kurikulum. Guru sebagai menyusun proses pembelajaran di kelas memiliki peran yang sangat penting karena guru merencanakan dan menentukan cara, metode, strategi, model pembelajaran yang akan digunakan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas. dalam proses pembelajaran tiga komponen di atas tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya (Suparlan, 2011, hlm. 11). Setiap system pendidikan nasional suatu negara tentu peran pemerintah sebagai sutradara dibaliknya tidak mungkin terelakkan (Sim, 2008, hlm. 743- 744). Proses perencanaan yang dilakukan oleh guru berdasarkan kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah yang berkuasa dan dilakukan pengembangan materi ajar (*Learning material development*) oleh guru atau pendidik. Jika diibartakan maka kurikulum adalah “kitab suci”, maka silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran dari “kitab suci” yang berupa kurikulum. Secara sederhana kurikulum tidak akan pernah bisa berjalan tanpa ada peran guru dalam proses pembelajaran.

Pendidikan tidak akan pernah jauh dari peran penguasa dalam mengontrol dan mengendalikan pendidikan melalui kebijakn yang dibuatnya. Pembelajaran melalui sekolah merupakan salah satu proses pembentukan pengetahuan. Negara melalui kurikulum nasional seakan berdiri di sisi lain dalam proses pembentukan pengetahuan (Pradipto, 2007, hlm. 221). Berdasarkan beberapa penelitian, negara Singapura merupakan salah satu negara yang mengontrol ketat pendidikannya,

pendidikan kewarganegaraan di bawah kekuasaan Partai tindakan rakyat (*Peoples's Action Party*) (Sim & Print, 2008, hlm. 705,). Hal ini diakibatkan oleh banyak hal salah satunya adalah gejolak politik global yang terjadi di berbagai belahan dunia sehingga pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu pendidikan yang dikontrol secara ketat oleh negara-negara di asia termasuk Singapura (Sim, 2011, hlm. 221). Oleh sebab itu Singapura terus melakukan inovasi kebijakan dalam menjaga stabilitas politik melalui kebijakan pendidikan.

Pengaruh *People's Action Party* (PAP) dalam perkembangan politik, ekonomi dan pendidikan di Singapura tidak bisa terelakkan. Isu ekonomi merupakan sumber utama legitimasi politik PAP sehingga ia mampu bertahan hingga sekarang (Sim, 2011, hlm. 222-223). Dalam menjaga dan menjalankan kekuasaan politiknya PAP menggunakan filosofi “lebih penting membangun kehidupan warga negara baik daripada ideologi politik”. Dengan kata lain ekonomi yang kuata merupakan prioritas utama dalam membangun Singapura. Bahkan ada slogan di Singapura rakyat akan mengikuti apapun aturan yang di buat oleh PAP asalkan rakyat sejahtera. Hal ini mengakibatkan lemahnya rakyat sipil dalam berbagai bidang kebijakan publik (Sim, 2011, hlm. 222). Ketika gejolak politik dunia terus berubah, dimana beberapa negara bahkan beganti rezim oleh sebab itu maka pemerintah PAP berusaha memasuki dunia pendidikan untuk tetap menjaga kekuasaanya. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan yang memiliki kontribusi dalam menjaga stabilitas politik di Singapura. Hegemoni negara terhadap pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk di kaji karena pendidikan kewarganegaraan tidak pernah lepas dari latar belakang sejarah dan struktur politik suatu negara (Kerr, 1999).

Pembangunan generasi muda suatu negara merupakan salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan diberbagai negara (Kerr, 1999) termasuk negara Singapura. Kemajuan Singapura dalam berbagai hal tidak lepas dari peran pendidikan di negara tersebut. Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah Singapura sejak melepas diri dari Malaysia pada tahun 1965 adalah bagaimana membangun ekonomi yang kuat dan warga negara muda sebagai penerus bangsanya salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan yaitu sejak tahun 1959 dengan sebutan *Ethics* sebelum keluar dari Malaysia pada bulan agustus tahun 1965 (Gopnath & Sharpe,

2004, hlm. 122; Sim, 2011, hlm. 221-222; Lee, 2013). Pendidikan kewarganegaraan di Singapura memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya sejak tahun 1959 ketika masih menjadi bagian dari Malaysia hingga tahun 2010 tercatat 12 kali terjadi perubahan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Singapura (Gopnathan & Bakar, 2013, hlm. 15; Lee: 2013, hlm. 246-248). Sejarah pendidikan kewarganegaraan ini menjadikan Singapura sangat penting untuk di bahas karena setiap negara memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda di setiap negara. Terlepas dari itu Singapura merupakan salah satu representasi kemajuan pendidikan di Asia bahkan di dunia.

Perkembangan suatu pendidikan tidak akan pernah jauh dari kebijakan politik dan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa begitu juga dengan negara Singapura. Sejak melepas diri dari Malaysia hingga sekarang Singapura hanya dikuasai oleh satu partai politik yaitu Partai tindakan rakyat (*People's Action Party*) PAP (Sim, 2011, hlm. 221-222). PAP telah menguasai perpolitikan di Singapura hingga saat ini dan berkuasa penuh atas parlemen di Singapura (Hefner, 2007, hlm. 147). Dominasi politik yang dilakukan oleh PAP tentu membuat para partai oposisi memandang PAP sebagai partai yang otoriter dalam mempertahankan kekuasaannya. Dominasi yang dilakukan oleh PAP tidak hanya pada ranah politik bahkan pemerintahan di bawah ideologi PAP melakukan intervensi secara ketat kepada guru-guru khususnya guru pendidikan kewarganegaraan di Singapura hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jasmine B-Y. Sim & Murray Print pada tahun 2009 tentang “*Citizenship education in Singapore: kontrolling or empowering teacher understanding and practice?*” dan pada tahun yang sama ia juga mengulas kembali bagaimana hegemoni yang dilakukan oleh negara terhadap pendidikan kewarganegaraan di Singapura dalam artikelnya yang berjudul “*State, Teachers and Citizenship Education in Singapore Schools*”. Pada tahun 2011 Jasmine B-Y. Sim kembali melakukan penelitian tentang “*Sosial studies and citizenship for participation in Singapore: how one state seeks to influence its citizens*” dalam hasil penelitiannya ia mengemukakan bahwa Singapura adalah contoh dari sebuah negara di mana ada kontrol terpusat dari kurikulum sekolah dan di mana para pemimpin politik mempunyai pengaruh langsung terhadap pendidikan kewarganegaraan. Hal ini dilakukan secara terkoordinasi dan berkelanjutan melalui kebijakan pendidikan. Bahkan ada

penelitian yang sangat menarik dan mencengangkan dari pendidikan kewarganegaraan di Singapura yakni dari penelitian yang dilakukan oleh Yeow-Tong Chia, pada tahun 2016 tentang “*Singapore General Election 2015 and the Role of Citizenship Education*” kemenangan PAP merupakan bentuk representasi dari keberhasilan pendidikan kewarganegaraan di Singapura, karena pendidikan kewarganegaraan di Singapura sebagai instrumen penguatan posisi PAP di mata masyarakat Singapura. Keberhasilan PAP pada tahun 2015 merajai perpolitikan di Singapura merupakan sesuatu yang lumrah karena PKn merupakan kepanjangan tangan dalam membentuk budaya politik di Singapura.

Tindakan otoriter pemerintah Singapura bukanlah negara otoriter biasa namun lebih kepada negara yang hegemonik ala gramscian (lihat Sim, 2011), dimana rakyat tidak merasa terhegemoni (lihat Kalidjernih, 2010) oleh negara, karena segala kebutuhan ekonomi terpenuhi, bahkan warga negara Singapura tidak peduli akan hal tersebut selama negara memberikan fasilitas dan tempat tinggal maka partai yang berkuasa akan tetap di pilih. Singapura sebagai pengusung ekonomi pragmatis sangat rentan terjadi dekadasi loyalitas, patriotisme dan nasionalisme Singapura. Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk menjaga agar warga negara muda Singapura memahami sejarahnya, cinta tanah airnya, dan loyal terhadap negaranya. Dominasi politik yang dilakukan PAP sangat mempengaruhi setiap sendi-sendi pendidikan, salah satu sendi pendidikan yang sangat penting adalah guru, guru tak luput dari pengaruh kebijakan pendidikan yang dibuat oleh penguasa (PAP) hal didukung oleh hasil penelitian Mark C. Baildon & Jasmine B. Y. Sim pada tahun 2006 tentang “*Notions of criticality: Singaporean teachers' perspectives of critical thinking in sosial studies*”, dalam artikel ini penulis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Singapura mempengaruhi pemahaman guru tentang “berfikir kritis”. Kurikulum yang diterapkan pada mata pelajaran *sosial studies* (nama PKn sebelum diganti pada tahun 2010 menjadi *Character and citizenship Education*, Lihat Ministry of Education, 2014) sangat menekan guru untuk tidak berfikir kritis terhadap pemerintah. Hal ini semakin menguatkan hubungan antara politik dan pendidikan di Singapura. Dominasi politik satu partai yang mempengaruhi kebijakan pendidikan kewarganegaraan menjadikan pendidikan kewarganegaraan Singapura sangat menarik

untuk di bahasa sebagai rujukan dinamika pendidikan kewarganegaraan internasional.

Berdasarkan latar tersebut artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru, kurikulum, perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Singapura melakukan proses pembelajaran di tengah-tengah hegemoni dengan kontrol ketat yang dilakukan oleh pemerintah di bawah ideology *People's Action Party* (PAP) di Singapura sebagai salah satu negara pendidikan terbaik di Asia.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari jurnal dan buku-buku yang memiliki keterkaitan kajian upaya pemerintah Singapura dalam menghegemoni guru pendidikan kewarganegaraan di Singapura.

Hasil dan pembahasan Hegemoni dalam Pendidikan

Upaya teoritis yang dilakukan oleh seorang Antonio Gramsci merupakan suatu produk pencarian hubungan antara teori dan praktik dalam tradisi marxisme. Salah satu teori Gramsci yang populer yang berlandaskan pemikiran Marxisme adalah teori Hegemoni (Amin, 2014:102; Pramono, 2014:75-78; Kalidjernih, 2010:58).

Hegemoni menurut Gramsci akan berhasil jika terjadi sebuah kesepakatan tanpa paksaan, kesepakatan ini tentu hasil dari proses belajar atau dengan kata lain Hegemoni adalah hubungan edukasional (*education realtionship*). Hubungan ini membentuk *civil society* yang terletak dasar-dasar dari kekuasaan. Disinilah peran lembaga-lembaga sosial ideologis, seperti hukum, pendidikan, mass media, agama (Tilaar, 2003, hlm. 77).

Dalam prinsip hegemoni Gramsci ada dua prinsip yang sangat mempengaruhi kebijakan pendidikan suatu negara antara lain: 1) Perang posisi (*war position*), 2) demokratisasi kehidupan sosial. Secara sederhana hegemoni Gramsci menyatakan bahwa pendidikan sebagai alata perlawanan hegemoni sekaligus sebagai arena hegemoni itu sendiri. Tilaar (2003:121-122) dalam bukunya "kekuasan dan pendidikan" menyatakan bahwa pendidikan dan hegemoni sangat erat hubungannya. Proses pendidikan yang dikuasai oleh negara merupakan sarana indoktrinasi untuk melestarikan atau melanggengkan kekuasaan yang ada. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa *the hidden curriculum* tampak dengan jelas betapa suatu kelompok atau

kelas dalam masyarakat memasukkan nilai-nilai ideologinya melalui proses pendidikan, meskipun hal ini melanggar aturan konstitusi sekalipun. Pendidikan akhirnya bukan memperdayakan tetapi membuat pembodohan. Salah satu pendidikan yang rentan terjadi pemasukan ideologi penguasa tau kelompok tertentu adalah pendidikan kewarganegaraan.

Selain Gramsci salah satu tokoh pendidikan dunia yang mengkritik keras tentang hegemoni yang dilakukan oleh negara dalam dunia pendidikan adalah Hendry Giroux. Ia mengemukakan bahwa pendidikan lebih dari sekedar reproduksi kebudayaan untuk memperkuat mereka yang sudah kuat dalam masyarakat dan mempertahankan marginalisasi terhadap mereka yang lemah. Seharusnya sekolah menjadi medan untuk melakukan perlawanan, pergulatan, perjuangan kultural, dan penentangan terhadap hegemoni budaya yang melahirkan stigmatisasi, penindasan, dan pengabain sebaian besar manusia (Palmer, 2015, hlm. 526-527; Haryatmoko, 2010, hlm. 187-190). Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sekolah seharusnya menjadi medan reproduksi dan transformasi kebudayaan, bukan mereproduksi budaya semata.

Giroux menawarkan pendidikan kritis radikal dalam melawan hegemoni penguasa yang mengontrol ketat suatu pendidikan. Dimana melalui pendidikan radikal para pendidik dan peserta didik mempertanyakan ideology dan kebudayaan siapa yang direpresentasikan dalam suatu kebijakan pendidikan. Hubungan kurikulum, pendidikan dan sekolah dapat saling bertentangan yang perlu dibongkar agar tidak terus menerus mendapat legitimasi. Oleh sebab itu para pendidik dan peserta didik perlu menyelidiki siapa yang membuat kurikulum, untuk siapa kurikulum di buat dan atas kepentingan apa kurikulum dibuat.

Dalam mengembangkan pendidikan kritis Giroux mengatakan bahwa belajar dan mengajar merupakan sebuah aktivitas politik semata (Palmer, 2015, hlm. 531). Dan sekolah merupakan medan perjuangan untuk memperoleh makna dan kekuasaan. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan intelektual transformative yang menggugah kesadaran pendidik dan peserta didik tentang berbagai permasalahan dan membangun kesadaran pendidik dan peserta didik sebagai agen kritis dalam mempertanyakan kebijakan politik dalam dunia pendidikan.

Hegemoni Ideologi dalam Pendidikan di Singapura

Pendidikan sangat erat kaitnya dengan masalah-masalah ideologi, terutama dalam mengembangkan apa yang dianggap nilai yang sesuai dalam masyarakat dan membangun rasa identitas nasional (Bell & Stevenson, 2006). Dalam hal ini ideologi PAP sebagai penguasa politik dan kebijakan pendidikan di Singapura. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pendidikan bilingual (dua Bahasa) dan pendidikan nasionalnya yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial dan perubahan perilaku warga negaranya (Sim, 2011). Melalui kebijakan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura maka hegemoni akan berlangsung hingga pengajaran pada level sekolah dan kelas-kelas di seluruh sekolah di Singapura.

Michael Apple (2004) dalam bukunya *“Curriculum and Ideology”* menjelaskan bahwa sekolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik dan ekonomi (Hidayat, 2013, hlm. 124). Globalisasi yang terjadi berbagai belahan dunia membuat liberalisme berkuasa di berbagai bidang kehidupan salah satunya dunia pendidikan. Pendidikan sangat erat hubungannya dengan struktur kekuasaan di dalam masyarakat dan negara (Arif, 2014, hlm. 122-123). Negara memiliki peran penting dalam menafsirkan ideologinya melalui arena pendidikan dengan jalan kekuasaan (*power*), pengaruh (*influence*), konflik dan alokasi nilai-nilai otoritatif (*authoritative allocation of values*) (Samsuri, 2011, hlm. 42-43). Tidak bisa dipungkiri pendidikan di Singapura tidak lepas dari pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi sejak merdeka dari Inggris dan lepas dari pemerintahan federasi Malaysia pada tahun 1965 (Tan & Chew, 2008, hlm. 147-148). Intervensi politik pendidikan yang dilakukan negara dalam membuat pendidik (guru) mau tidak mau mengikuti apa yang di instruksikan oleh negara. Begitu juga di Singapura dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, para penguasa menggunakan pendidikan untuk menciptakan kesadaran palsu warga negara sehingga warga negara terhegemoni oleh kekuatan ekonomi dan kesejahteraan yang dibangun oleh penguasa yang berkuasa sehingga tidak kritis dalam menanggapi isu sosial, politik dan ekonomi. Bahkan Soek-Fang Sim (2006) dalam artikelnya yang berjudul *Hegemonic authoritarianism and singapore: Economics, ideology and the asian economic crisis* hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah di Singapura (PAP) membuat rakyat Singapura mendukung penuh PAP bahkan saat krisis tahun 1997 yang melanda

Asia pasifik. Penelitian lain yang menunjukkan bahwa dominasi politik PAP di Singapura merupakan hasil hegemoni secara kontinuitas Kenneth Paul Tan, seorang pengajar di *Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore* pada tahun 2012 tentang *“The Ideology of Pragmatism: Neo-liberal Globalisation and Political Authoritarianism in Singapore”*, dalam artikelnya secara tegas mengatakan bahwa dominasi satu partai di Singapura merupakan hasil ideologis yang dilakukan secara kontinu yang menyebarkan retorika pragmatisme untuk menghubungkan gagasan kesuksesan yang mengesankan untuk menarik modal global masuk ke Singapura, namun disisilain untuk tetap menjaga semua itu maka pemerintah PAP harus menjaga stabilitas politik sehingga kekuasaan tetap terjaga.

Pentingnya pendidikan sebagai instrument pencapaian tujuan politik dan sosial merupakan sesuatu yang lumrah (Sim, 2011, hlm. 223). Sehingga penyediaan pendidikan merupakan kunci untuk mencapai membangun masyarakat yang dicita-citakan. Pemerintah memiliki tugas membangun warga negara muda kearah masa depan negara yang lebih baik, sehingga sekolah menjadi sangat penting dalam membangun hal tersebut. Sekolah menjadi tempat utama pendidikan kewarganegaraan meskipun hal itu juga bisa di dapatkan di keluarga, media dan komunitas lainya. Dengan kata lain sekolah tetap menjadi sumber utama pendidikan kependudukan bagi kaum muda dan satu jalan di mana pemerintah dapat mempertahankan tingkat kontrol dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, di Singapura pendidikan adalah instrumen utama untuk pendidikan kewarganegaraan, dengan fokus untuk menumbuhkan loyalitas nasional, patriotisme, rasa memiliki, dan komitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam tujuan pembangunan nasional (Sim, 2011, hlm. 224).

Meskipun guru di Singapura “selalu diminta secara ideologis untuk membentuk identitas tertentu”, namun mereka tetap “pembaca” dari kurikulum dan teks dan praktik pedagogik dan, oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk membuat makna dari tafsir mereka sendiri (Nozaki 2005, hlm. 8). Demikian pula, Thornton (2005, hlm. 10-26) dalam bukunya tentang *“Teaching social studies that matter: Curriculum for active teaching”* mencirikan para guru sebagai kurir instruksional instruksional, yang mencerminkan peran mereka yang terkenal sebagai pengendali dari apa yang diajarkan dan bagaimana hal itu diajarkan di kelas. Penjagaan

gerbang guru menyiratkan bahwa ada banyak kemungkinan pendidikan dalam kurikulum studi sosial. Konsekuensinya, sebuah kurikulum bukan sekadar produk yang dikembangkan oleh para ahli sebagai naskah untuk guru tapi juga sebuah kelas di mana kurikulum yang sama dapat disusun dan diajarkan dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan guru menafsirkan bahkan kurikulum yang ditentukan.

Hegemoni Negara dalam Pendidikan di Singapura

Pemerintah Singapura di bawah PAP dalam mempertahankan kekuasaannya menggunakan sistem "*soft authoritarianism*" atau otoritarianisme lunak. Dalam sistem ini, biasanya negara-negara ini memerintah atas nama konstitusionalisme namun sering menggunakan undang-undang untuk menekan aktivitas politik dari warga negara. Dalam pemerintahan otoriter lunak, negara membangun sebuah sistem pendidikan untuk mendisiplinkan pemilih (warga negara) daripada membangun warga negara yang kritis dan informstif, hal ini disebabkan adanya ketidakpercayaan pemerintah atas warga negara. Dalam system ini tugas warga negara Singapura pasif, hanya bertugas legitimasi rezim yang berkuasa (pemerintah dibawah PAP), sedangkan tugas negara hanya memberikan keamanan dengan cara menyortir warga negara yang merepotkan atau mengusik pemerintahan, bahkan tak segan-segan menegeksekusi orang-rang yang berlawanan dengan politik penguasa. (Mohamed & Turner, 2013, hlm. 339-340; Ardila, 2014, hlm. 1-11; Imam, 2016, hlm. 1-3). Dalam system ini kewajiban warga negara terhadap negara lebih penting dari pada negara kepada warga negara demi kepentingan nasional suatu negara dalam hal ini negara Singapura.

Partai tindakan rakyat (*People's Action Party*) yang kemudian disingkat PAP merupakan satu-satunya partai yang berkuasa dan memiliki kekuasaan penuh atas kendali pendidikan, ekonomi dan politik di Singapura. Sejak keluar dari federasi Malaysia pada tahun 1965 negara Singapura muda saat itu mulai tertatih-tatih dalam membangun ekonomi karena tidak ada sumberdaya alam yang dikembangkan sehingga hanya dengan ekonomi pragmatis agar Singapura tetap bertahan (Ardila, 2014, hlm. 1-3, Sim, 2005, hlm. 62). Diluar keberhasilan PAP dengan kader-kadernya membangun ekonomi Singapura memiliki masalah tidak kalah penting dimana gejolak poilitik dunia dan sikap pragmatisme

warga negara yang mengancam masa depan generasi penerus di Singapura.

Sistem pendidikan terpusat di Singapura, pengembangan kurikulum dimulai di tingkat pemerintahan tertinggi. Pendidikan kewarganegaraan melalui kendaraan studi sosial pada kurikulum 2001 sampai 2010 adalah kurikulum yang direncanakan dengan cermat dengan tujuan yang digambarkan dengan jelas untuk mereproduksi pandangan elit masyarakat Singapura secara budaya. Atau dengan kata lain kurikulum pendidikan merupakan representasi dari ideology penguasa di Singapura (PAP), sehingga ada kesenjangan besar antara apa yang diinginkan untuk terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi di kelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jasmine B-Y. Sim dan Murray Print pada 2009 tentang "*citizenship education in Singapore: kontrolling or empowering teacher understanding and practice?*" menunjukkan bahwa guru merupakan pintu terakhir dalam pemerintah dalam membangun pengetahuan melalui pandangan elit-elit atau ideology partai penguasa di Singapura.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen inti dari sistem pendidikan Singapura. Sejak tahun 1997, negara Singapura telah berusaha memasukkan elemen kunci kewarganegaraan ke dalam program unik dan komprehensif yang disebut Pendidikan Nasional atau "*national education*" (NE), yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1997 (Sim, 2001, 2011; Sim & Print 2009; Lee, 2013; Ho, 2010). Tiga tujuan utama pendidikan kewarganegaraan dari sistem pendidikan Singapura adalah: mempromosikan kesetiaan kepada negara Singapura, melestarikan tradisi dan nilai budaya dan rasial yang berbeda, dan memelihara harmoni budaya, agama dan rasial (Singapore Ministry of Education, 2004).

Hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dalam hasil penelitian yang di lakukan oleh Li-Ching Ho pada tahun 2010 tentang "*Don't Worry, I'm Not Going to Report You: Education for Citizenship in Singapore*" hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dalam menginternalisasikan nilai-nilai dan cita-cita negara secara kritis, hal ini dapat dilihat dari tiga tema kunci yang dominan dalam temuan penelitian yakni, cita-cita nasional tentang kemajuan dan consensus, kosep yang ketat dan yang terakhir sangat kurangnya pendapat atau argumentasi yang berlawanan. Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni negara terus

direproduksi oleh guru sebagai pintu terakhir dalam menjaga kekuasaan pemerintah dan menekan agar warga negara tidak kritis dalam menanggapi isu-isu nasional.

Secara umum hegemoni melalui pendidikan kewarganegaraan di Singapura dapat dilihat dari agenda Pendidikan Nasional “*National Education*” (NE). NE merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan yang berlangsung di Singapura. Kewarganegaraan dalam konteks Pendidikan Nasional bersifat nasionalistik dan komunitarian yang merupakan interpretasi dari ideologi partai penguasa (PAP) atau lebih dekat dengan tradisi negara republik yang menekankan tanggung jawab dan tugas, dan mengesampingkan kepentingan individu demi kebaikan bersama dan ranah publik. Ini bertentangan dengan tradisi kewarganegaraan liberal yang menekankan status. Dan hak individu yang terkait dengannya, di mana hak-hak ini dilindungi oleh batas-batas konstitusional kekuasaan pemerintah (Kymlicka, 2002). Pendidikan Kewarganegaraan terlihat dalam pelayanan kepada bangsa, budaya bersama dan nilai-nilai bersama, yang mencerminkan pemerintah mengejar pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi kebutuhan nasional negara Singapura. Persoalannya adalah bagaimana mendamaikan kebutuhan kesetiaan warga negara terhadap rezim yang berkuasa dengan hak partisipasi demokratis yang sama pentingnya. Pendidikan Nasional tidak diajarkan sebagai mata pelajaran spesifik di sekolah-sekolah di Singapura, namun dimasukkan ke dalam kurikulum Melalui mata pelajaran seperti studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan adalah kendaraan utama untuk Pendidikan Nasional (*National education*) kemudian disingkat menjadi NE. studi sosial dan Pendidikan kewarganegaraan diperkenalkan ke semua sekolah di tingkat atas pada tahun 2001, pada saat itu siswa berusia 15-16 tahun. Ini adalah subjek terpadu yang wajib dan patut diperhatikan, focus studi sosial dan kewarganegaraan adalah upaya pada peningkatan kesadaran akan isu-isu nasional, yang berkaitan dengan sejarah, Pembangunan ekonomi dan sosial Singapura, serta regional dan internasional isu yang berdampak positif pada Singapura (MOE, 2006).

Pemerintah berasumsi bahwa dengan mengetahui perkembangan Singapura, para siswa akan percaya diri untuk menatap masa depan, dan akibatnya lebih partisipatif. Dengan demikian, kurikulum studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan merupakan konstruksi yang

tidak bisa lepas dari politik dan ideologi penguasa (Sim, 2009, hlm. 708-709). Sehingga, yang mencerminkan pandangan dunia tertentu dan ideologi dominan yang melayani kelompok kepentingan tertentu. Pemerintah Singapura melalui *Ministry of education* (MOE) yang kuat dan terpusat, Memiliki konsepsi ideal tentang masyarakat dan kewarganegaraan dan ini harus disampaikan kepada siswa dalam hal pengetahuan dan nilai yang menonjol, untuk membantu mereka menjadi orang-orang yang percaya diri setia dalam seperangkat kebenaran tertentu yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Dan sementara semua pemerintah, dengan tingkat yang berbeda-beda, mengendalikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk mendidik warga masa depan, hanya sedikit negara-negara demokrasi yang menyatakan menggunakan tingkat kontrol seperti yang ditemukan di Singapura salah satu negara yang melakukan kontrol seperti ini adalah Indonesia pada masa Orde baru dengan politisasi pendidikan kewarganegaraan. Dalam mengerakkan kontrol tersebut, pemerintah Singapura percaya bahwa sistem pendidikannya mampu membuat warga negara patuh mengikuti arahnya.

Dalam buku teks pendidikan kewarganegaraan di Singapura sangat menekankan pada prestasi-prestasi yang di peroleh oleh PAP sehingga sangat sulit menemukan kekurangan dan kritik terhadap pemerintah oleh warga negara, bahkan ada konsepsi bahwa pendidikan di Singapura memang harus di tentukan oleh pemerintah terlihat dari ungkapan dalam wacana pendidikan Singapura yakni “*fbater knows the best*” artinya bahwa pemerintahlah satu-satunya yang menegetahui pendidikan seperti apa yang dibutuhkan oleh warga negara Singapura (Sim, 2011, hlm. 757-758). Harapan ini belum tentu tercapai, hal ini disebabkan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan praktik pendidikan di sekolah yakni antara Pendidikan Nasional dan praktik pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

Hegemoni terus dilakukan oleh pemerintah di sekolah-sekoah, dimana pemerintah PAP menjadikan sekolah-sekolah sebagai sekutu untuk menyusun sistem pendidikan nasional terpadu dari ketentuan etnis yang terpecah dan dipihak secara politis yang diwarisi dari bahasa Inggris. Secara ekonomi, langkah semacam itu juga diperlukan untuk membangun keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk industrialisasi (Sharpe & Gopinathan, 2002). Sistem pendidikan

terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah, menempatkan tangan para penguasa sebagai alat ideologis yang penting. Sim (2011, hlm. 244) menatakan melalui pendidikan warga negara harus diubah menjadi warga negara yang sangat terorganisir dan sangat disiplin, semuanya menarik ke arah yang sama dengan rasa semangat dan pengorbanan pribadi untuk kepentingan nasional. Sejak awal, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menanamkan nilai di sekolah dan kebutuhan ekonomi pendidikan. Secara efektif, warga harus meninggalkan politik dan menyerahkan semua urusan politik pada PAP. Kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) makna sebagai persaudaraan akar rumput, di mana orang-orang berorganisasi untuk saling membantu tanpa memiliki ambisi atau ideologi politik (Sim, 2011, hlm. 244). Akibatnya, kebijakan pragmatis menyebabkan warga yang semakin tidak dilepas yang dicirikan mementingkan diri sendiri dan materialistik, dengan pola pikir umum untuk tunduk pada pemerintah yang berkuasa (dalam hal ini PAP) (Sim, 2011:244-245).

Hegemoni Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Singapura

Dalam kurikulum sistem pendidikan terpusat di Singapura dan kontrol ketat oleh pemerintah, Studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan, sebagai inti Pendidikan Nasional merupakan subjek yang direncanakan dengan cermat dengan tujuan yang jelas untuk mereproduksi pandangan elit masyarakat Singapura. Bagaimana sesungguhnya warga negara Singapura yang idela menurut para elit politik. Hal ini ditransmisikan guru kepada siswa dalam hal pengetahuan dan nilai yang penting untuk membantu siswa menjadi orang percaya dan setia kepada negara. Dalam hal ini guru pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membangun pengetahuan peserta didik tentang bagaimana manusia Singapura sesungguhnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sim, J. B.Y pada tahun 2011 "*Simple ideological "Dupes" of Nation Governments? Teacher Agency and Citizenship Education in Singapore*" menunjukkan hasil yang menarik, dimana meskipun guru 'selalu diminta secara ideologis untuk membentuk identitas tertentu', namun mereka tetap "pembaca" kurikulum dan teks dan praktik pedagogis oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk membuat makna mereka sendiri. Guru sebagai kurator kurikulum-

instruksional menunjukkan bahwa ada banyak kemungkinan praktik pendidikan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Konsekuensinya, sebuah kurikulum bukan sekadar produk yang dikembangkan oleh dari tangan para elit sebagai naskah untuk guru tapi juga sebuah praktik pembelajaran di kelas dimana kurikulum yang sama dapat disusun dan diajarkan dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, hal ini memungkinkan memungkinkan guru memiliki multi tafsir atau bahkan kurikulum ditentukan sendiri oleh guru (Sim, 2011).

Sistem pendidikan dipusatkan di bawah kendali pemerintah, menempatkan guru sebagai alat ideologis yang penting. Pendidikan kewarganegaraan difokuskan untuk menumbuhkan loyalitas nasional, patriotisme, rasa memiliki, dan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam tujuan pembangunan nasional. Di bawah pendidikan kewarganegaraan pemerintah ini berfokus pada sosialisasi politik dan moral. Siswa diajar isu-isu masalah nasional seperti kerukunan rasial dan religius, pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, dan peran mereka dalam mendukung proyek nasional, yang menekankan diterimanya *status quo* (Tan and Chew, 2004). Populasi dianggap sebagai warga negara yang sangat terorganisir dan sangat disiplin yang menarik ke arah yang sama dengan rasa semangat dan pengorbanan pribadi untuk kepentingan nasional. Guru di Singapura pada umumnya diharapkan agar tidak menagajar pembelajaran yang membangun kekeritisan kepada siswa karena hal itu akan mengancam stabilitas negara dan hal ini merupakan sebuah tindakan yang tidak tepat dilakukan oleh seorang PNS sehingga keritisan menjadi hal yang sangat rentan dalam pendidikan Singapura. Fakta diatas menunjukkan pemerintah hanya menempatkan guru hanya sebagai alat yang efektif dalam menjaga *satus quo* pemerintah yang berkuasa (Baildon & Sim, 2014, hlm. 402-422).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jasmine B-Y. Sim & Murray Print, pada tahun 2009 tentang "*Citizenship education in Singapore: kontrolling or empowering teacher understanding and practice?*". Adapun data ini didapat melalui penelitian yang dilakukan selama tiga tahun yang melibatkan 8 guru dari 4 sekolah menengah atas di Singapura. Sapel dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan sekolah tempat mengajar, gender, Etnis, latar belakang pendidikan dan lama mengajar.

Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan ada tiga karakteristik orientasi pedagogis guru Pendidikan kewarganegaraan di Singapura, *pertama* Guru sebagai pendidik nasionalistik, *Kedua*, Guru sebagai pendidik yang peduli secara sosial, *ketiga*, Guru sebagai pendidik yang berorientasi pada orang atau peserta didik.

a. Guru sebagai Pendidik Nasionalistik

Setengah dari guru studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan yakni, Peter, Vind, Leong, dan Carolyn dapat dianggap sebagai pendidik nasionalistik, meskipun dengan variasi. Bagi mereka, seperti yang dirangkum oleh Leong, 'Kewarganegaraan terikat pada bangsa, jika bangsa ini ada, kita adalah warga negara ... bangsa ini memberi kita identitas kita.' Bangsa ini adalah rujukan utama mereka, dengan tema dominan nasionalisme yang berjalan melalui pemahaman mereka dalam praktek studi sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Nasionalisme berarti dukungan bagi bangsa, yang oleh, Peter dan Leong, digambarkan dalam hal "membela bangsa, menjaga kedaulatan kita", hal ini dipengaruhi oleh pengalaman wajib militer yang mereka pernah lewati. Sebaliknya, para wanita melihat dukungan sebagai 'berkontribusi kembali kepada masyarakat', di mana Vind berbicara tentang 'melakukan dengan baik dalam pekerjaan Anda untuk berkontribusi pada ekonomi, dan membantu Singapura bergerak maju.' Para guru memiliki kesadaran nasional yang setara. Pelajaran yang diajarkan adalah 'untuk melahirkan atau mempersiapkan siswa untuk mengetahui tentang negara ini, memahami masa lalu dan tantangan Singapura,' dengan implikasi yang jelas bagi warga negara karena 'ini adalah tanggung jawab kita'.

b. Guru sebagai pendidik yang peduli secara sosial

Sepasang guru, Marcus dan Frida, dapat dicirikan sebagai pendidik yang peduli secara sosial dengan partisipasi sebagai tema yang dominan. Guru berusaha untuk 'secara aktif melibatkan orang-orang di komunitas mereka di mana kehidupan dilewati ... berpartisipasi dalam penyebab dan masalah lokal.' 'Semakin banyak yang berpartisipasi,' Frida mencatat, 'semakin kuat rasa keterikatan dan keterikatan' Society adalah referensi utama mereka, 'Orang-orang yang hidup bersama sebagai sebuah komunitas', dengan 'keprihatinan bersama dan institusi bersama "jaringan hubungan saling ketergantungan" dan penghormatan terhadap

perbedaan.' Hubungan erat antara kewarganegaraan dan masyarakat tersirat di mana anggota terikat oleh rasa komunitas, identitas mereka ditentukan dengan referensi dan berpartisipasi di dalam kelompoknya. Oleh karena itu, individu bukanlah inti, tapi penting sejauh dia adalah bagian dari masyarakat. Gagasan guru tentang kebaikan bersama dan kesadaran sosial tidak menunjukkan komitmen nasionalistik, namun merupakan ungkapan tanggung jawab terhadap orang lain karena begitulah cara orang bersikap satu sama lain terhadap orang lain.

c. Guru sebagai Pendidik yang Berorientasi pada Peserta didik

Guru yang terakhir yakni, David dan Ying, dapat dicirikan sebagai pendidik yang berorientasi pada peserta didik. Perkembangan pribadi adalah tema yang dominan, fokusnya adalah 'keseluruhan pribadi, dan seumur hidup.' Hal ini berkaitan dengan pengembangan konsep diri dan efektivitas pribadi yang positif, dan kesempatan untuk pertumbuhan individu dan pemenuhan diri. Dalam tipe ini guru memberikan tanggapan kepada negara yang dianggap paternalistik dan otoriter, guru mengatakan "Kami seperti anak-anak yang membutuhkan disiplin melalui undang-undang dan peraturan yang keras, yang dimaksudkan untuk mensosialisasikan warga agar menyetujui. "Ini untuk kebaikan kita, negara mengatakan, untuk stabilitas ekonomi." Rasa pasif dan tidak berdaya dirasakan oleh warga negara termasuk guru.

Lanjutan dari penelitian ini pada tahun terakhir mengungkapkan bahwa delapan guru pendidikan kewarganegaraan yang dipekerjakan tidak terhegemoni, meskipun mereka adalah pegawai pemerintah dalam keadaan yang sangat terorganisir dengan pendidikan kewarganegaraan yang sangat preskriptif. Sebagai gantinya, empat pendekatan pedagogis diidentifikasi: ekspositori dan sangat terkontrol, rasionalistik dan persuasif, interaktif dan partisipatif, dan konstruktif dan eksperiensial. Keempat pendekatan ini terkait dengan bagaimana guru mengkonseptualisasikan kewarganegaraan. Guru memiliki orientasi yang bervariasi terhadap kewarganegaraan dan sejumlah kewarganegaraan yang disepakati dengan cara yang berbeda dari wacana resmi. Orientasi ini ditandai oleh tiga sikap dominan: nasionalistik, perhatian sosial, dan berorientasi pada orang.

Tidak hanya guru yang diintervensi secara ketat namun materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan juga di kontrol ketat oleh pemerintah sehingga materi-materi tersebut dapat merepresentasikan keberhasilan dan kesuksesan Singapura dibawah kekuasaan politik PAP selama bertahun-tahun (Sim, 2009). Terdapat Empat tema luas diidentifikasi dalam konsep pendidikan kewarganegaraan mereka, yaitu rasa identitas, hak dan tanggung jawab, partisipasi dan sejarah nasional.

Simpulan

Guru merupakan gerbang terakhir pemerintah dalam melanggengakan kekuasaannya. Dalam konteks guru di Singapura adalah pegawai negara dan oleh karena itu, menerima apa yang menjadi kebijakn pemerintah. Sebagai penerima, guru diharapkan melakukan apa yang diminta oleh mereka oleh badan pendidikan, kurikulum resmi, dan sekolah. Secara khusus, para guru diharapkan menyampaikan pesan Pendidikan Nasional (*national education*) melalui pengajaran studi sosial, dengan pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pembangunan bangsa. Tujuan kurikulum studi sosial dinyatakan secara eksplisit, materi pelajaran yang ditentukan, dengan materi instruksional yang dikembangkan MOE untuk memastikan kesetiaan warga negara. Namun, para guru bukanlah pemancar pengetahuan eksternal yang dengan mudah dipengaruhi oleh kurikulum nasional meskipun sebagian guru masih menerapkan sesuai dengan instruksikan oleh pemerintah. Ada beberapa guru mengkonseptualisasikan kewarganegaraan dari berbagai sudut pandang, yaitu, *nasionalistik*, perhatian sosial, dan berorientasi pada orang, dengan dua yang terakhir berbeda dari wacana resmi. Akibatnya, serangkaian pendekatan pedagogis terkait dengan sikap nasionalistik, perhatian sosial, dan orang-orang. Masing-masing, mereka adalah ekspositori dan sangat terkontrol, ratifitis, dan pada saat bersamaan bersifat persuasif, interaktif dan partisipatif, dan konstruktif dan eksperiensial.

Berdasarkan pemaparan diatas jelas telah membuktikan bahwa, hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah Singapura melalui kebijakan pendidikan kewarganegaraan dalam upaya menjaga *status quo* tidak berhasil seperti apa yang diharapkan. Analisis di atas dari delapan guru hanya 4 guru yang menerapkan sesuai dengan instruksi pemerintah yang tersurat dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Atau

dengan kata lain, hegemoni berupa pengontrolan secara ketat tidak sepenuhnya berhasil. Kedelapan guru tersebut menunjukkan bahwa konseptualisasi kewarganegaraan mereka merupakan bagian integral dari pemahaman tentang apa yang mereka lakukan atas nama pendidikan kewarganegaraan dalam studi sosial. Konseptualisasi mereka bervariasi dan mempengaruhi pendekatan terhadap pendidikan kewarganegaraan, pengalaman yang akan dialami siswa, jenis keterampilan yang akan mereka kembangkan, jenis pesan yang akan mereka terima tentang kehidupan kolektif mereka, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

Berdasarkan pemaparan diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak sepenuhnya benar persepsi yang mengatakan guru terhegemoni oleh negara meskipun kontrol ketat dilakukan oleh pemerintah dan begitu juga dengan guru pendidikan kewarganegaraan Singapura meskipun telah mendapat pelatihan dengan baik pada pendidikan kewarganegaraan atau dengan kata lain, tidak semua pendidik atau guru di Singapura terhegemoni oleh kekuasaan PAP dengan penguatan ekonomi sebagai alat legitimasi politiknya. Hal ini tentu bisa dijadikan sebagai refleksi bagi para pendidik atau guru pendidikan kewarganegaraan di seluruh dunia agar tidak begitu saja menerima atau terhegemoni oleh aturan yang dibuat oleh penguas. Akan tetapi, guru harus mampu menyesuaikan kebutuhan peserta didik agar menjadi warga negara muda yang baik.

Referensi

- Amin, M. (2014). Pokok-pokok Pemikiran Antonio Gramsci dan Relevansinya dengan pendidikan. dalam buku pendidikan pos modernism. Yogyakarta: Ar-Ruzmedia.
- Apple, M. W. (2004). *Curriculum and ideology*. New York: Routledge.
- Gopnathan, S. & Bakar, 2013. *Globalization, Curriculum Reform, Vision and Discourses*, sebuah bab dalam buku globalization and the Singapore curriculum from policy and classroom. Singapore: Springer.
- Ardilla, A.F. (2014). Demokrasi semu di Singapura pada Masa Pemerintahan Lee Kuan Yew. Dalam *jurnal hubungan internasional Vol 1, No 2*.
- Baildon, M. C. & Sim, J.B.Y. (2009). Notions of criticality: Singaporean teachers' perspectives of critical thinking in sosial

- studies. Dalam jurnal *Cambridge Journal of Education* Vol. 39, No. 4, pp, 407–422.
- Chia, Y.T. (2016). Singapore General Election 2015 and the Role of Citizenship Education. Dalam jurnal *The Round Table*, Vol. 105, No. 2, pp 149–160.
- Djamarah, S.B. (2010). *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka cipta
- Gopinathan, S & Sharpe, L.(2004). New Bearings for Citizenship Education in Singapore. Bab dalam buku citizenship Education in Asia and Pasific concepts and issues. Hongkong: Springer and Bussines Media.
- Hefner, R, W. (2007). Politik Multikultural. Yogyakarta: Kanisius
- Imam, M.A.H. (2016). Sistem pemerintahan *soft-authoritarian* Singapura di tengah arus demokrasi. Dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 1 no.2, hal 1-5*.
- Kalidjernih, F.K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal Dan Political*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Ministry of education Singapore, (2016). *Character and Citizenship Educatin Pre-university*. Singapore: Student development Curriculum Devision Ministry of education Singapore.
- Mohamed, K.N. & Turner, B.S.(2013) Governing as gardening: reflections on soft authoritarianism in Singapore. Dalam jurnal *citizenship studies, volume 17, no,3-4. Pp.339-352*.
- Nozaki, Y., Openshaw, R., & Luke, A. (2005). *Struggles over difference: Curriculum, texts, and pedagogy in the Asia-Pacific*. New York: SUNY Press.
- Palmer, J.A. (2015). *Ide-Ide Brilian 50 Pakar Pendidikan Kotemporer: Paling Berpengaruh di dunia Pendidikan Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Pramono, M. (2014). Melacak Basis Epistemologi Antonio Gramsci. Dalam bukua Epistemologi Kiri. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia
- Rupert, M. (2010). *Antonio Gramsci*. Dalam Edniks, J & Vaughan, N.W. Teori-teori Kritis Menentang Pandangan Politik Internasional. Yogyakarta: Baca.
- Samsuri, (2011). *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Diantara Pustaka Indonesia
- Sim, J. B.Y (2011). Simple ideological “Dupes” of Nation Governments? Teacher Agency and Citizenship Education in Singapore. Sebuah bab dalam buku *Citizenship Pedagogies in Asia and Pacific*. London New York: Springer.
- Sim, J.B.Y & Print, M. (2005). Citizenship Education and Sosial Studies in Singapore: A National Agenda. Dalam jurnal *International Journal of Citizenship and Teacher Education Vol 1, No. 1, pp 58-73*.
- Sim, J.B.Y & Print, M. (2009). Citizenship education in Singapore: controlling or empowering teacher understanding and practice? Dalam jurnal *Oxford Review of Education Volume 35, no.6, Pp705-723*.
- Sim, J.B.Y. (2011). Sosial studies and citizenship for participation in Singapore: how one state seeks to influence its citizens. Dalam jurnal *Oxford Review of Education Vol. 37, No. 6, pp. 743–76*.
- Sim. J.B.Y & Print. M. (2009). Citizenship Education In Singapore: Kontrolling Or Empowering Teacher Understanding And Practice. Dalam jurnal *British Journal of Educational Studies, ISSN Vol. 57, No. 4, pp 380–399*.
- Sim. J.B.Y & Print. M. (2009). The State, Teachers and Citizenship Education In Singapore Schools. Dalam jurnal *Oxford Review of Education Vol. 35, No. 6, pp. 705–723*.
- Suparlan, (2008). *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Tan, K.P (2012). The ideology of pragmatism: neoliberalisation and political authoritarianism in Singapoe. Dalam *Journal of Contemporary Asia Vol. 42, No. 1, pp. 67–92*.
- Thornton, S.J. (2005) *Teaching sosial studies that matter: Curriculum for active teaching*. New York: Teachers’ College Press.
- Tilaar, H. A.R. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera
- Tilaar, H. A.R. (2016). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar